

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada period ke-2 Presiden Joko Widodo, politik luar negeri Indonesia memiliki prioritas yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan kegiatan diplomasi. Prioritas yang dimaksud merupakan prioritas yang dibawahhi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan merupakan strategi dalam kegiatan diplomasi Indonesia selama lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemlu di bawah Menteri Retno Marsudi telah merancang strategi politik luar negeri Indonesia yang menjadi arah tujuan diplomasi Indonesia, yakni “Prioritas 4+1”. (Kemlu RI, 2020) Prioritas 4+1 merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang terfokus pada 4 pilar utama diplomasi, yaitu penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan & kebangsaan serta diplomasi kontribusi & kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Untuk +1 yaitu pondasi untuk melaksanakan empat pilar tersebut, yaitu penguatan infrastruktur diplomasi. (Seskab RI, 2015)

Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, fokus arah politik Indonesia memiliki sedikit perbedaan, di mana pada periode pertama, Indonesia berfokus pada potensi maritim yang berupaya menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”. Dengan melihat potensi Indonesia di sektor maritim, Presiden Joko Widodo berupaya memaksimalkan potensi tersebut

melalui poros maritim dunia tersebut. Sebelum priode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) politik luar negeri Indonesia berfokus pada politik luar negeri proaktif dan damai, dengan melakukan pendekatan ”*Thousand Friends, Zero Enemies*”. Frasa ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang proaktif dengan berfokus pada membangun hubungan baik dengan banyak negara, menghindari konflik dan permusuhan, dan mengedepankan diplomasi damai dan kerja sama Internasional.

Dari kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan SBY, politik luar negeri Indonesia sejatinya tetap mengedepankan kebijakan “Politik Bebas Aktif” sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945. Penerapan politik bebas aktif sebagai pondasi arah politik luar negeri Indonesia berupaya agar terus aktif di forum-forum internasional dan tetap menjaga stabilitas internasional. Seperti halnya arah politik luar negeri dari dua Presiden seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Presiden SBY dengan pendekatan proaktifnya dan Presiden Joko Widodo dengan pendekatan maritim dan 4 + 1-nya. Dari kedua arah politik tersebut, dapat dilihat bahwa arah politik luar negeri Indonesia pada era Presiden SBY lebih dominan berfokus pada hubungan luar negeri dan menjaga stabilitas internasional, sedangkan pada era Presiden Joko Widodo, berfokus pada peningkatan potensi nasional yang lebih spesifik seperti halnya pada poros maritim dunia dan Prioritas 4 + 1. (Aziz & Surya, 2024)

Dalam Prioritas 4+1, kerja sama merupakan poin penting dalam keberhasilan 4 pilar utama, di mana masing-masing pilar mempunyai pendekatan yang berbeda dalam mencapai keberhasilan. Hal tersebut mengacu pada prioritas mana yang menjadi fokus tiap tahun pelaksanaan Prioritas 4+1 karena situasi politik internasional yang pada waktu tertentu mengharuskan pemerintah menentukan prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kerja sama yang dimaksud ialah kerja sama bilateral maupun multilateral dengan tujuan meraih kesepakatan bersama agar dapat saling memberi keuntungan antar negara atau *stakeholder* terkait satu sama lain. Prioritas 4+1 mendorong kerja sama yang diplomatis dengan mengoptimalkan potensi Indonesia dari berbagai sektor agar dapat bersaing secara global. (Seskab RI, 2015)

Seperti yang dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), pada PPTM pertama periode ke-2 pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2019. Menteri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Prioritas 4+1 dirancang sebagai arah politik luar negeri Indonesia agar dapat meningkatkan kontribusi serta peranan Indonesia di kancah global dengan menekan pada sektor ekonomi yang lebih luas dan peranan Indonesia dalam permasalahan global terutama dalam isu perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dasar tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Prioritas 4+1 yang berjalan selama hampir lima tahun telah melalui serangkaian dinamika yang mengharuskan Indonesia untuk melewati beberapa tantangan, salah satunya yaitu pada akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2023 yang di mana kondisi

perekonomian dunia saat itu berada pada titik kurang stabil disebabkan pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk berpikir lebih keras dalam menyeimbangkan perekonomian negara melalui beberapa kerja sama dalam sektor kesehatan, teknologi serta industri ke beberapa mitra agar dapat bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan dengan permasalahan kedaulatan serta perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di beberapa wilayah berkonflik. Kondisi tersebut tentunya mendorong pemerintah agar dapat bekerja lebih keras dalam melaksanakan Prioritas 4+1 yang menjadi arah politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan periode ke-2 Presiden Joko Widodo melalui Kemlu RI sebagai pelaksana dalam pelaksanaan Prioritas 4+1. (Kemlu RI, 2020)

Pengetahuan akan arah Politik Luar Negeri Indonesia merupakan hal yang sejatinya diketahui oleh Mahasiswa Hubungan Internasional, di mana arah Politik Luar Negeri Indonesia merupakan dasar atau landasan dalam mengkaji berbagai isu diplomasi Indonesia terhadap situasi global. Hal ini sejalan dengan diangkatnya penelitian terkait arah Politik Luar Negeri Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode ke-dua ini yang berfokus tentang pembahasan terkait Prioritas 4+1 yang dirancang oleh Kemlu RI. Dari penelitian ini dapat ditemukan beberapa kegiatan diplomasi Indonesia selama 5 tahun ke belakang dalam berbagai topik serta *stakeholder* terkait.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Prioritas 4+1 merupakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang berfokus pada pengembangan diplomasi dalam sektor ekonomi, kedaulatan serta kontribusi Indonesia di mana fokus tersebut sejalan dengan poin-poin yang terdapat dalam Kebijakan Prioritas 4+1.

Diketahui bahwa poin-poin tersebut ialah penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, diplomasi kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia serta ditambah dengan penguatan infrastruktur diplomasi. Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam penelitian ini berfokus dalam poin-poin di atas serta kegiatan diplomasi yang telah dilaksanakan selama 5 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2019-2024) dalam hal ini dikoordinir oleh Kemlu RI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana strategi Indonesia dalam mewujudkan program kebijakan Prioritas 4+1?
2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebijakan Prioritas 4+1?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menarik dari rumusan masalah di atas, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis bagaimana strategi Indonesia dalam implementasi kebijakan Prioritas 4+1 ini agar dapat mewujudkan kebijakan yang dibuat.

2. Untuk dapat mengevaluasi program seperti apa yang dibuat pemerintah Indonesia dalam mewujudkan arah politik luar negeri di periode ke-2 Presiden Joko Widodo.
3. Untuk menganalisis program seperti apa yang telah terlaksana selama 5 tahun ke belakang serta mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam kebijakan tersebut.

Adapun manfaat yang dapat diberikan melalui penelitian ini ialah :

1. Dapat mengetahui lebih dalam seputar kegiatan diplomasi Indonesia selama priode ke-2 pemerintahan presiden Joko Widodo.
2. Dapat menambah pengetahuan serta referensi terkait isu-isu diplomasi Indonesia.
3. Dapat mengetahui serta membandingkan efektivitas program-program yang disiapkan oleh Indonesia dalam menyukseskan kebijakan Prioritas 4+1 dan ikut serta dalam memberikan masukan maupun saran dalam kebijakan diplomatik Indonesia di periode mendatang.

1.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan tiga konsep yang akan menjawab seputar penelitian ini yaitu kepentingan nasional (*national interest*), politik luar negeri, dan diplomasi. dalam konsep kepentingan nasional akan membahas terkait menjaga kepentingan internal dalam menjalankan Prioritas 4+1 di mana dalam hal ini mencakup aspek keamanan (keamanan kedaulatan dan keamanan warga negara), ekonomi dan politik. Aspek tersebut nantinya akan dikolerasikan ke dalam judul penelitian di mana selaras dengan poin-poin dalam Prioritas 4+1.

Untuk konsep yang kedua yaitu politik luar negeri, konsep ini berfokus pada pembuatan kebijakan serta fenomena politik yang terjadi dalam lingkup global. Ketiga yaitu Diplomasi, konsep ini menekankan pada kegiatan kerja sama yang di mana di dalamnya terdiri dari kerja sama bilateral serta multilateral yang di dalamnya membahas seputar kegiatan diplomatik global.

1. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Konsep Kepentingan Nasional sangat mencerminkan segala regulasi yang terdapat dalam kegiatan diplomatik Indonesia terkait Prioritas 4+1. Hal ini mencakup dalam aspek keamanan, ekonomi dan politik. Hal ini dapat mempresentasikan Prioritas 4+1 ke dalam gambaran Kepentingan Nasional itu sendiri.

Kepentingan nasional atau biasa disebut *National Interest* merupakan tujuan dan ambisi dari sebuah negara dalam sertor apapun yang mencakup kepentingan. Konsep ini sangat penting sebagai dasar bagi sebuah negara dalam melakukan hubungan internasional. (Bainus & Rachman, Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, 2018)

Dalam praktik sejarah seputar kepentingan nasional dapat ditelusuri melalui kisah hubungan internasional yang bersifat kompetitif dan konflikual selama berabad-abad lamanya, khususnya di Eropa. Kepentingan nasional telah bersifat agresif yang menciptakan perang-perang besar yang menyangkut kepentingan sebuah negara. Hal ini menjadi bukti bahwa wujud kepentingan nasional pada masa itu bersifat agresif. (Bainus & Rachman, Kepentingan Nasional dalam Hubungan

Internasional, 2018)

Setelah berakhirnya era kolonialisasi antara tahun 1960-an dan perang dingin 1989, era baru telah muncul dengan mengambil konsep kekuasaan non-negara, yang berarti manusia secara individu maupun kolektif (komunitas/institusi swasta) sebagai pemberi legitimasi kebijakan negara. Pada era itu kepentingan negara yang bersifat egois dan agresif tergantikan dengan kepentingan yang bersifat individualis sekaligus altruistik dan persuasif yang non-destruktif (*soft power*). (Bainus & Rachman, Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, 2018)

Perubahan atensi dari agresif ke non-destruktif menimbulkan banyak perubahan dalam kegiatan diplomasi pada era berikutnya, sebagai contoh ialah pola diplomasi yang diterapkan sebuah negara dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya dengan cara yang dapat dikatakan lebih halus dan lebih diplomatis. Cara yang diterapkan dengan membuat sebuah negosiasi antar negara (Bilateral) atau lebih (Multilateral), hal tersebut membuat minimnya ketegangan Politik antar negara dikarenakan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *soft power* yang mengutamakan negosiasi ketimbang perebutan paksa atau perang.

2. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan dari suatu negara yang mengarah pada hubungan eksternal dan sifatnya global. (Bakry, 2017) Terdapat banyak pengertian dari tentang politik luar negeri, yakni pengertian secara tradisional, sederhana maupun singkat. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tafsiran yang berbeda oleh para ahli dan juga secara definitif politik luar negeri dapat diartikan berbeda oleh tiap orang. (Bakry, 2017)

Menurut Thomas Diez, secara tradisional politik luar negeri dapat diartikan sebagai kebijakan dari suatu negara yang diarahkan ke aktor-aktor eksternal dan khususnya negara lain. (Diez, Bode, & da Costa, 2011) Secara singkat, Christopher Hill mengartikan politik luar negeri sebagai keseluruhan dari hubungan eksternal yang resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya suatu negara, tetapi tidak eksklusif) dalam hubungan internasional. (Hill, 2016) Secara sederhana, menurut Ernest Petric bahwa politik luar negeri adalah aktivitas suatu negara untuk memenuhi tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingannya dalam arena internasional, (Petric, 2013) dari ketiga pengertian tersebut dapat kita simpulkan kembali bahwa politik luar negeri merupakan suatu kegiatan eksternal yang berupa kebijakan yang sifatnya global.

Politik luar negeri sebagai teori hubungan internasional dapat diartikan sebagai “sistem” yang merupakan pengembangan aktivitas oleh suatu negara untuk merubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas negara itu sendiri terhadap lingkungan internasional. (Bakry, 2017) Hal tersebut dapat kita lihat dalam tindakan suatu negara saat ini dalam menentukan kebijakan luar negeri agar dapat sesuai dan adaptif dengan lingkungan internasional. Kebijakan yang dibuat juga tidak semata hanya menyesuaikan lingkungan eksternal namun juga melihat situasi internal suatu negara, hal tersebut selaras dengan dibuatnya prioritas 4+1 yang di dalamnya terdapat kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan antara situasi eksternal maupun internal Indonesia. (Kemlu RI, 2020)

Konsep politik luar negeri Indonesia sendiri menerapkan konsep diplomasi bebas aktif yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Sabir, 1987) Arti dari bebas aktif sendiri yaitu secara harfiah mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu memihak salah satu pihak atau negara akan tetapi tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan internasional. (Sabir, 1987)

3. Diplomasi

Teori diplomasi dalam hubungan internasional merujuk pada praktik dan prinsip yang mengatur interaksi antarnegara melalui perwakilan resmi, dengan tujuan mencapai kepentingan nasional secara damai. Diplomasi berfungsi sebagai alat utama untuk memelihara hubungan antara negara, menyelesaikan konflik, dan mempromosikan kepentingan nasional melalui negosiasi dan dialog. Diplomasi dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan hubungan internasional yang melibatkan negosiasi dan komunikasi antara negara atau entitas internasional. (Wilson, 2022)

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan taktik dalam hubungan resmi antar pemerintah negara-negara berdaulat. (Wiseman, 2022) Artian tersebut selaras dengan prinsip berdiplomasi negara Indonesia terutama di dalam Prioritas 4 + 1 yang menekankan pada kerja sama antar negara berdaulat yang menekankan pada negosiasi agar tercipta kesepakatan bersama tanpa adanya konflik di dalamnya. (Kemlu RI, 2020)

Tujuan utama dari diplomasi adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. (Wiseman, 2022) Ini mencakup berbagai aspek, seperti:

- Membangun citra positif di mata internasional.
- Menjaga keamanan dan integritas teritorial.
- Memperoleh dukungan politik dan ekonomi dari negara lain.

- Mengamankan perlindungan bagi warga negara di luar negeri.
- Menciptakan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya

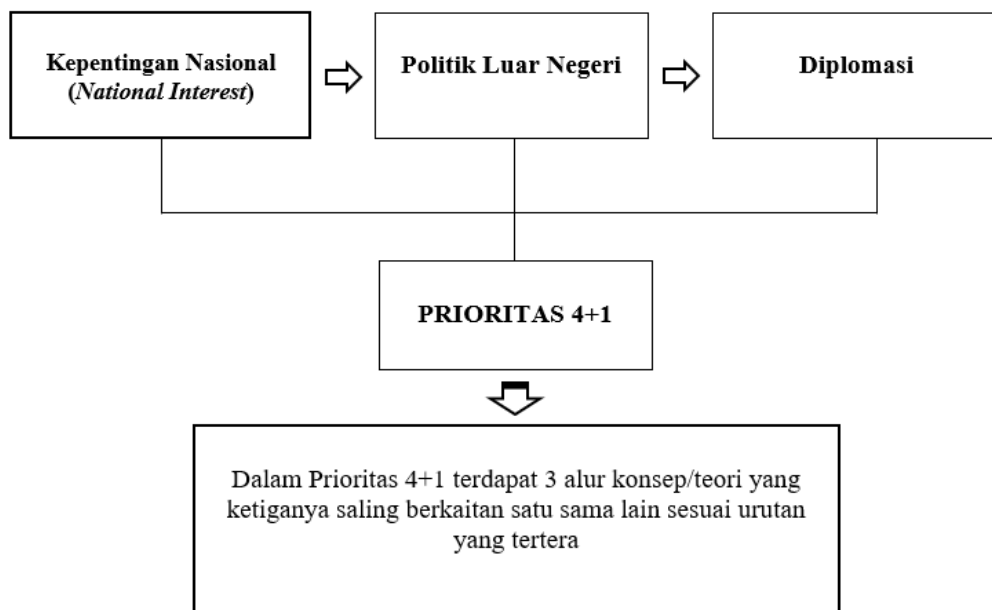
Diplomasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

- Diplomasi Bilateral: Hubungan antara dua negara secara langsung.
- Diplomasi Multilateral: Melibatkan banyak pihak dalam forum internasional seperti PBB.
- Diplomasi Publik: Upaya untuk memengaruhi opini publik di luar negeri melalui komunikasi budaya dan informasi

Teori diplomasi dalam hubungan internasional menekankan pentingnya komunikasi dan negosiasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik tanpa menggunakan kekerasan. Diplomasi bukan hanya tentang penyelesaian konflik, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik antarnegara demi kepentingan bersama. (Wiseman, 2022)

Skema 1.1

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI-ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2019-2024 DALAM MEWUJUDKAN PRIORITAS 4 + 1



Dari skema penelitian di atas, peneliti menggunakan tiga konsep dalam menganalisis penelitian terkait Prioritas 4 + 1 yaitu kepentingan nasional (*national interest*), politik luar negeri (*polugri*) dan diplomasi. Tiga konsep tersebut relevan dengan keberlangsungan kebijakan 4 + 1, hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan yang berfokus pada penguatan diplomasi serta penguatan ekonomi negara, di mana dalam melakukan kegiatan tersebut tentunya terdapat aspek negosiasi, perancangan kebijakan serta kebergantungan dalam menjalin kerja sama agar dapat menyempurnakan prioritas 4 + 1.

Ketiga konsep di atas terlihat memiliki alur di mana berawal dari kepentingan nasional lalu ke politik luar negeri lalu ke diplomasi. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam menganalisis Prioritas 4+1, perlu melihat terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dalam lingkup nasional serta strategi negosiasi seperti apa yang akan dibuat. Setelah menemukan strategi dalam melihat kepentingan nasional yang dibuat oleh pemerintah, kemudian melihat rancangan kebijakan seperti apa yang dibuat dalam lingkup eksternal, setelah itu dapat dilakukan kegiatan diplomasi berupa kerja sama maupun negosiasi.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait Prioritas 4 + 1, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana dalam menganalisa kebijakan ini menggunakan metode pengumpulan data dari fakta lapangan yang terjadi selama berjalannya kebijakan Prioritas 4 + 1 melalui studi pustaka dan wawancara.

2. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam hal ini adalah melalui studi pustaka berupa jurnal, buku, dokumen, arsip kementerian, laporan, berita dan wawancara ke pihak Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis kebanyakan bersumber dari data yang diperoleh melalui studi pustaka, berita serta arsip kementerian dan hasil wawancara oleh pihak BSKLN Kemlu RI yang kemudian disatukan menjadi satu kesatuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepentingan Nasional (National Interest)

Kepentingan nasional adalah konsep fundamental dalam hubungan internasional yang mengacu pada tujuan dan prioritas utama suatu negara dalam upaya mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kemakmuran. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional sering menjadi dasar pengambilan keputusan, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam perjanjian dan kerja sama internasional. (Frankel, 2017) Secara umum, kepentingan nasional mencakup tiga aspek utama :

1. Keamanan Nasional

Meliputi perlindungan kedaulatan, integritas wilayah, dan stabilitas negara dari ancaman eksternal maupun internal. Hal ini merujuk pada poin diplomasi kedaulatan dan kebangsaan pada poin Prioritas 4 + 1 di mana keamanan nasional menjadi faktor penting dalam stabilitas politik luar negeri.

2. Ekonomi

Fokus pada pengembangan dan keberlanjutan ekonomi melalui perdagangan internasional, investasi, dan akses ke sumber daya. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pendapat per kapita US\$ 5.271 dengan asumsi kurs Rp 16.244 di tahun 2024. Pada Prioritas 4 + 1, diplomasi ekonomi menjadi sangat penting melihat potensi suatu negara dapat dinilai salah satunya melalui perekonomian negara itu sendiri.

3. Identitas dan Nilai-Nilai

Mencakup perlindungan budaya, ideologi, dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu negara. Hal ini sejalan dengan Prioritas 4 + 1 yang berupaya mempertahankan identitas Indonesia melalui perlindungan kebudayaan serta memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke kancah global.

Dalam hubungan internasional, konsep ini sering dikaitkan dengan pendekatan realisme, yang menganggap negara sebagai aktor utama yang bertindak berdasarkan kepentingan nasional untuk memaksimalkan kekuasaan dan keamanan. (Rosecrance, 2016)

Kepentingan nasional sering menjadi faktor utama dalam menentukan interaksi antarnegara, baik dalam bentuk kerja sama maupun konflik. Konsep ini biasanya terbagi menjadi dua kategori utama yaitu kepentingan vital dan non-vital. Kepentingan vital melibatkan aspek yang esensial bagi kelangsungan hidup negara, seperti keamanan nasional dan kedaulatan. Kepentingan non-vital mencakup kepentingan lain seperti pengembangan ekonomi, promosi budaya, dan peran internasional negara. (Bainus & Rachman, 2018)

Kepentingan nasional adalah tujuan, nilai, dan kepentingan mendasar suatu negara yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional biasanya mencakup keamanan, kedaulatan, stabilitas politik, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya yang dianggap penting oleh suatu negara untuk bertahan dan

berkembang. (Frankel, 2017)

Implementasi teori kepentingan nasional pada Prioritas 4 + 1 terdapat pada lingkup analisis kepentingan nasional Indonesia yang dijadikan arah pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini secara umum diterapkan oleh seluruh negara dalam membuat kebijakan luar negeri agar dapat sesuai dengan kepentingan dari negara tersebut. (Bainus & Rachman, Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, 2018)

Indonesia dengan potensi nasionalnya menjadikan Prioritas 4 + 1 sebagai arah politik luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari poin pada Prioritas 4 + 1 yaitu diplomasi (ekonomi, perlindungan, kedaulatan, dan kepemimpinan). Poin-poin tersebut dipilih melalui analisa potensi serta kepentingan nasional Indonesia yang kemudian dijadikan prioritas utama dalam kegiatan diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai pola awal dalam menentukan prioritas utama dalam kegiatan diplomasi Indonesia. (Frankel, 2017)

2.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam menghadapi negara atau entitas internasional lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan, diplomasi, ekonomi, budaya, serta hak asasi manusia. Dalam konteks hubungan internasional, politik luar negeri tidak hanya mengenai interaksi antara negara-negara, tetapi juga mencakup peran

negara dalam organisasi internasional dan dengan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional. (Hudson, 2020)

Menurut Joseph Nye, politik luar negeri dapat dipahami sebagai strategi yang dirancang oleh negara untuk mengejar kepentingan nasional, baik itu melalui pendekatan yang kooperatif (kerja sama) atau kompetitif (persaingan). Politik luar negeri juga berfungsi untuk memastikan bahwa negara dapat menjaga kedaulatannya, memperkuat daya tawar di panggung internasional, dan mencapai tujuan-tujuan yang dianggap vital bagi kelangsungan hidup negara. (Carlsnaes, 2022)

1. Fungsi dan Tujuan Politik Luar Negeri

Politik luar negeri memiliki beberapa fungsi utama, yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasional. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

a) Perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional

Salah satu tujuan utama politik luar negeri adalah menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks ini, negara berusaha untuk melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal, baik berupa serangan militer, serangan teroris, atau ancaman non-militer seperti penyebaran ideologi yang dapat merusak stabilitas dalam negeri. (Hudson, 2020)

Dalam Prioritas 4 + 1, salah satu contoh implementasi politik luar negeri dalam perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional yaitu melalui penindakan tegas terhadap separatisme. Menteri Retno Marsudi melalui pernyataan pers dikatakan bahwa Indonesia

menindak tegas terhadap kelompok separatis bersenjata, komitmen pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan tidak dapat ditawar. (Kemlu RI, 2024)

b) Pengembangan Ekonomi

Politik luar negeri berperan besar dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Ini termasuk pembentukan perjanjian perdagangan, kebijakan investasi asing, serta pengelolaan sumber daya alam yang berhubungan dengan negara-negara lain. Banyak negara mengandalkan kebijakan luar negeri untuk menciptakan peluang perdagangan internasional yang menguntungkan atau untuk melindungi industri dalam negeri melalui kebijakan proteksionis. (Hudson, 2020)

Salah satu kebijakan Indonesia melalui Prioritas 4 + 1 yaitu dengan mendorong industri kreatif dan digital. Indonesia menjadi penggerak utama resolusi PBB yang menetapkan tahun 2021 sebagai tahun Ekonomi Kreatif Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (*International Year of Creative Economy for Sustainable Development*). (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022)

c) Manajemen Konflik

Politik luar negeri juga berfungsi untuk mengelola dan menyelesaikan konflik internasional secara damai. Diplomasi menjadi alat utama dalam hal ini. Negara menggunakan saluran diplomatik untuk merundingkan kesepakatan atau menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekuatan militer. (Hudson, 2020)

Prioritas 4 + 1 sebagai prioritas utama politik luar negeri Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik regional maupun global dapat teratasi melalui kegiatan diplomasi. Hal tersebut sejalan dengan poin diplomasi kedaulatan serta diplomasi kontribusi dan kepemimpinan. (Kemlu RI, 2024)

2. Teori dan Pendekatan dalam Politik Luar Negeri

Ada berbagai teori dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis politik luar negeri. Beberapa teori utama dalam hubungan internasional dan politik luar negeri adalah:

a) Realisme

Teori ini berpendapat bahwa negara berperilaku berdasarkan kepentingan rasional yang terfokus pada kekuasaan dan keamanan. Dalam pandangan realis, negara bertindak untuk melindungi dirinya sendiri di tengah-tengah ketidakpastian dan ancaman global. Realisme memandang bahwa konflik antarnegara adalah hal yang tak terhindarkan karena sifat alamiah manusia yang cenderung mengejar kekuasaan dan dominasi. (Hartanto & S. Sudarman, 2013)

b) Liberalisme

Berbeda dengan realisme, liberalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran global. Negara-negara, menurut pandangan ini, tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan kekuasaan semata, tetapi juga berusaha untuk bekerja sama dalam rangka mencapai keuntungan bersama melalui organisasi internasional, kesepakatan perdagangan, dan norma-norma internasional. (Hartanto & S. Sudarman, 2013)

c) Konstruktivisme

Teori ini berfokus pada peran identitas, ideologi, dan norma dalam membentuk kebijakan luar negeri negara. Konstruktivisme berpendapat bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh faktor sosial dan ideologis, bukan hanya oleh kepentingan material atau kekuasaan. Dalam pendekatan ini, hubungan antarnegara dapat dibentuk melalui konstruksi sosial dan nilai-nilai bersama. (Hartanto & S. Sudarman, 2013)

2.3 Diplomasi

Diplomasi adalah proses dan praktik yang digunakan oleh negara-negara dan aktor internasional lainnya untuk berkomunikasi, bernegosiasi, serta menyelesaikan masalah dan konflik melalui saluran damai. Diplomasi bertujuan untuk mengelola hubungan antarnegara dalam rangka mencapai kepentingan politik, ekonomi, sosial, atau strategis. Dalam hubungan internasional, diplomasi berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan

kebijakan luar negeri, memajukan tujuan nasional, mengelola kerjasama internasional, serta menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan kekuatan militer. (Wilson, 2022)

Diplomasi bukan hanya terbatas pada pertemuan formal antara kepala negara atau pejabat tinggi suatu negara, tetapi juga mencakup berbagai saluran komunikasi yang lebih luas, termasuk hubungan antara masyarakat, organisasi internasional, sektor swasta, dan berbagai aktor lainnya yang berperan dalam dinamika global. Dengan kata lain, diplomasi merupakan seni dan ilmu bernegosiasi yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dan menjaga stabilitas hubungan antarnegara. (Wiseman, 2022)

Dalam Prioritas 4 + 1, teori diplomasi merupakan bagian dari hampir seluruh pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini dapat dilihat secara umum bahwa poin-poin pada Prioritas 4 + 1 merupakan kegiatan diplomasi di mana dalam poin tersebut terdapat 4 poin utama yaitu diplomasi (ekonomi, perlindungan, kedaulatan, dan kepemimpinan) serta ditambah dengan penguatan infrastruktur diplomasi sebagai pelaksana kegiatan diplomasi Indonesia.

1. Tujuan Diplomasi dalam Hubungan Internasional

a) Mengelola Konflik dan Mencegah Perang

Salah satu tujuan utama diplomasi adalah mengelola dan menyelesaikan konflik internasional untuk menghindari perang. Negara-negara sering kali menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seperti dalam penyelesaian

konflik wilayah atau sengketa sumber daya alam. Diplomasi juga digunakan untuk merundingkan perjanjian perdamaian yang mencegah eskalasi konflik, seperti yang dilakukan dalam perjanjian damai yang dihasilkan setelah perang dunia I dan II, atau dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina. (Setiawan, 2016)

b) Perlindungan Kepentingan Nasional

Diplomasi merupakan alat yang sangat penting untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi membantu negara untuk menjaga kedaulatannya, memperkuat keamanan nasional, serta memajukan tujuan-tujuan strategisnya di luar negeri. Dalam banyak kasus, kebijakan luar negeri suatu negara berfokus pada diplomasi untuk mencapai kepentingan dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan politik. (Setiawan, 2016)

c) Meningkatkan Kerja Sama Internasional

Diplomasi bertujuan untuk memperkuat hubungan internasional dan kerja sama antarnegara, baik dalam masalah bilateral maupun multilateral. Negara-negara menggunakan diplomasi untuk membangun aliansi strategis, memperluas akses pasar melalui perjanjian perdagangan, serta mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, penanggulangan pandemi, atau terorisme internasional. Diplomasi juga digunakan dalam kerangka organisasi internasional seperti PBB, WTO, atau WHO untuk menangani tantangan bersama. (Setiawan, 2016)

d) Memperbaiki Citra Negara

Diplomasi memainkan peran penting dalam membangun citra negara di kancah internasional. Melalui diplomasi, negara dapat mempromosikan nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian internasional. Negara juga menggunakan diplomasi untuk memperkenalkan budaya mereka, memengaruhi opini publik global, dan memperkuat posisi politik mereka dalam komunitas internasional. (Setiawan, 2016)

e) Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Global

Diplomasi juga berfungsi untuk menangani isu-isu global yang memerlukan kolaborasi antarnegara. Isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, migrasi, dan pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak dapat diselesaikan oleh satu negara sendirian. Diplomasi internasional membantu negara-negara untuk bekerja sama dalam merumuskan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. (Setiawan, 2016)

2. Jenis-Jenis Diplomasi

a) Diplomasi Tradisional

Diplomasi tradisional, atau diplomasi pemerintah, melibatkan pertemuan antara pejabat pemerintah negara untuk membahas masalah bilateral dan multilateral. Biasanya, diplomat atau duta besar yang ditugaskan di luar negeri berfungsi sebagai perantara antara negara mereka dan negara yang bersangkutan. Diplomasi ini berfokus pada negosiasi formal, kesepakatan politik, atau penyelesaian sengketa melalui saluran diplomatik resmi. (Wiseman, 2022)

b) Diplomasi Publik

Diplomasi publik merujuk pada upaya negara untuk memengaruhi opini publik internasional melalui media massa, budaya, pendidikan, dan komunikasi langsung dengan masyarakat asing. Diplomasi ini bertujuan untuk membangun citra positif, memperkenalkan nilai-nilai nasional, serta meningkatkan pengaruh negara di luar negeri. Contoh diplomasi publik dapat ditemukan dalam program-program pertukaran budaya, beasiswa internasional, atau penyiaran media yang mempromosikan budaya negara. (Wiseman, 2022)

c) Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan kebijakan ekonomi untuk memperkuat hubungan internasional. Diplomasi ini berfokus pada perundingan perjanjian perdagangan, investasi asing, serta kebijakan ekonomi internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara. Diplomasi ekonomi mencakup negosiasi tentang tarif perdagangan, akses pasar, dan bantuan pembangunan. (Martauli, 2015)

d) Diplomasi Multilateral

Diplomasi multilateral melibatkan negosiasi dan kerja sama antara lebih dari dua negara dalam forum internasional atau organisasi multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Diplomasi ini diperlukan untuk menangani masalah-masalah global yang melibatkan banyak negara dan memerlukan konsensus internasional, seperti perubahan iklim atau penanggulangan pandemi. (Chrisa Grace Nada, 2021)

e) Diplomasi Kesehatan dan Lingkungan

Diplomasi ini mencakup usaha untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah kesehatan global, seperti pandemi atau wabah penyakit menular, serta isu-isu lingkungan yang memerlukan perhatian internasional, seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Negara-negara menggunakan diplomasi ini untuk

merumuskan kebijakan bersama, seperti dalam perjanjian Paris tentang perubahan iklim. (Valerie Tania Margono, 2021)

3. Peran Diplomasi dalam Prioritas 4 + 1

Diplomasi dan Prioritas 4 + 1 merupakan satu kesatuan, di mana Prioritas 4 + 1 sebagai pondasi dan diplomasi menjadi alat untuk melakukan negosiasi maupun kegiatan yang berkaitan dengan aspek hubungan antar negara maupun *stakeholder* yang menghasilkan kesepakatan serta stabilitas antar pelaksana diplomasi.

Sebagai contoh dalam diplomasi ekonomi, Indonesia mendorong diversifikasi pasar ekonomi melalui perluasan hubungan ekonomi dengan Afrika, Asia Selatan, dan Pasifik. Hal tersebut dapat tercapai melalui kegiatan diplomasi dan negosiasi yang matang agar dapat terealisasi. Penguatan infrastruktur diplomasi juga sangat diperlukan, dalam Prioritas 4 + 1, Indonesia melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan kualitas diplomat Indonesia agar menghasilkan diplomat yang unggul. (Kemlu RI, 2024)

Diplomasi adalah komponen penting dalam hubungan internasional yang memainkan peran sentral dalam menjaga hubungan antarnegara, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama di tingkat global. Diplomasi terus berkembang dengan kemajuan teknologi, perubahan politik global, dan keterlibatan lebih banyak aktor internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, diplomasi menjadi lebih inklusif dan mencakup lebih banyak saluran komunikasi, dari diplomasi tradisional hingga diplomasi digital

dan diplomasi non-pemerintah. (Wilson, 2022)

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia Di-Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019-2024 Dalam Mewujudkan Prioritas 4 + 1” peneliti mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Surya I. Rachmawan dalam jurnalnya yang berjudul "Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Prioritas 4+1 - Jurnal Diplomasi Ekonomi" yang diterbitkan di tahun 2020. Jurnal ini membahas peran diplomasi ekonomi dalam prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra dan menciptakan peluang perdagangan yang menguntungkan bagi Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi kesuksesan Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional, kebijakan investasi asing, dan kerjasama ekonomi regional seperti melalui ASEAN dan APEC. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan "4+1" terhadap diplomasi ekonomi Indonesia di Asia Tenggara dan dunia internasional, dengan melihat sektor-sektor seperti perdagangan, energi, dan infrastruktur. (Rachmawan, 2020)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Yani H. Dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Diplomasi Indonesia terhadap Isu Perubahan Iklim Global - *International Environmental Diplomacy Journal*” yang diterbitkan di tahun 2021. Penelitian ini mengkaji peran Indonesia dalam diplomasi lingkungan hidup dan perubahan iklim. Mengingat Indonesia merupakan salah

satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia, kebijakan luar negeri Indonesia harus memperhitungkan dampak perubahan iklim, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Diplomasi lingkungan menjadi bagian dari prioritas 4+1, yang menekankan kerjasama internasional dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. (H., 2021)

Penelitian ini menganalisis diplomasi Indonesia dalam konteks perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris, serta kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam menangani isu lingkungan global. (H., 2021)